

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustina, Rosa, 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*, (Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia.
- Ali, M Hatta. 2012. *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, Alumni, Bandung.
- Ali, Ahmad. 1991. *Menguak Tabir Hukum: suatu kajian filosofis dan sosiologis*, Jakarta : Chandra Pratama, ed.1.
- Asshiddiqie, Jimly. 1997. *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*. Jakarta: Ind. Hill.Co.
- Bentham, Jeremy. 1998 *A fragment on Government* in Burns, JH and Hart HLA (eds) London, Cambridge. Cambridge University Press.
- _____. 1791. *An Introduction to The Principle of Moral and Legislation*, Batoche Books.
- Campa, Alejandro Alvarez de la. 2011. *Increasing Access to Credit through Reforming Secured Transactions in the MENA Region*”, World Bank Group.
- Cooter, Robert and Ulen, Thomas. 2016. *Law and Economics*, 6th edition" Berkeley Law Books. Book 2. <http://scholarship.law.berkeley.edu/books/2>
- Fadjar, A Mukhti. 2014. *Teori-Teori Hukum Kontemporer*, Setara Press, Malang

- Friedman, Lawrence M. 1930. *American Law: an Introduction*, 3rd Edition, Oxford University Press.
- _____. 1930. *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, 2001. Terjemahan dari *American Law An Introduction*, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, Jakarta: Tatanusa,
- Harahap, M. Yahya. 1997. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- _____, 1988. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Gramedia.
- Hartono, Sunaryati, 1994. *Penelitian hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke 20*, PT. Alumni, Bandung.
- _____. 1991. *Kapita selekta perbandingan hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ibrahim, Johny. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008.
- Marciano, Alain, 2019. *Economic Analysis of Laws*, in A. Marciano, G. B. Ramello (eds.), *Encyclopedia of Law and Economics “ Encyclopedia of Law and Economics”*, Springer, ,
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, 2005, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta,.

- OECD, 2017, *Regulatory Policy in Korea: Towards Better Regulation*, OECD
Reviews of Regulatory Reform, OECD Publishing, Paris
- Posner, Richard A, 2007, *Economic Analysis Of Law, Seventh Edition*, Aspen
Publishers, New York,
- _____, *Economics of Justice*, 1981, Harvard University Press Cambridge,
Massachusetts and London, England.
- Rawls, John, *A Theory of Justice*, 2006, diterjemahkan: Uzair Fauzan dan Heru
Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Satrio, J .1999. *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, 1999, Bandung :
Alumni,.
- Sugianto, Fajar.2013. *Economic Analysis of Law, Seri Analisis Ke Ekonomian
tentang Hukum, Seri I, Pengantar*, 2013.Kencana, Jakarta, edisi revisi,
- Supancana , Ida Bagus Rahmadi, 2017. *Sebuah Gagasan tentang Grand Design
Reformasi Regulasi Indonesia*, Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Atma
Jaya
- Tejaningsih, Titik, 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Separatis
Dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, FH UII Press,
Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2008. *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty,
Yogyakarta.
- Notohamidjojo O. 1970. *Makna Negara Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen.

- Notohamidjojo O. 2011. *Soal-Soal pokok Filsafat Hukum*, 2011, Griya Media, Salatiga.
- Wahyono, Padmo, 1984. *Guru Pinandita*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Ph. Visser't Hoft. 2001. *Penemuan Hukum (Judul Asli: Rechtvinding)*, Penerjemah B. Arief Shidarta. Bandung: Laboratorium Hukum FH Universitas Parahiyangan
- Nonet, Philippe & Philip Selznick, 2001. *Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi*, diterjemahkan : Rafel Edy Bosco, Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), Terjemahan, 2003, Jakarta,
- _____, *Law and Society in Transition Towards Responsive Law*, New Jersey: Transcasion Publishers, 2001.
- Sutantio, Retnowulan, SH., 1989. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. CV Mandar Manju, Bandung, Cet 6,.
- Sidharta, Bernard Arief (Penerjemah). 2009. *Meuwissen tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Bandung. PT Rafika Aditama
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 2006
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1990. *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta,.

Suriasumantri, Jujun S., *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009

Sukmadinata Nana, S, 2006. *Metode Penelitian Pendidikan*, PT Rosda Karya, Bandung.

Utrecht, 1962. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ichtiar.

Varghese, Maju. 2018. *Trap of Doing Business Ranking*, 2018, Center for Financial Accountability, New Delhi.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Perundang-undangan Indonesia

TAP MPR RI No VIII/MPR/2000 tentang Laporan tahunan Lembaga-lembaga Tinggi Negara

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)

Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering, (Rv) (Staatsblad tahun 1847 Nomor 52.)

Rechtreglement voor de Buitengewesten (RbG) yaitu hukum acara yang berlaku di Persidangan perkara perdata maupun pidana di Pengadilan di Luar Jawa dan Madura. Tercantum (Staatblad Tahun 1927 Nomor. 227).

Het herzeine Indonesisch reglement (HIR), Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui, (Staatsblad tahun 1941 Nomor 44)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura.

Undang-Undang nomor 19 Tahun 1964 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Perpu 1-1998 Tentang
Perubahan UU Kepailitan Menjadi UU

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu,

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan UU Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh UU Nomor 15 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif yang berlaku di Mahkamah Agung dan Badan Pengadilan yang berada dibawahnya

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berbasis Risiko.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012,

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2020,

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Bidang Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan.

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah 2015

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagaimana telah diubah oleh Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan terakhir kali oleh Peraturan Mahkamah Agung RI 2 Tahun 2016 tentang Mediasi.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana,

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan sebagaimana telah diganti oleh Peraturan Mahkamah Agung RI 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1992 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014, Tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan. Tingkat banding pada 4 Lingkungan Peradilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/ Pemberitahuan.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI 2 Tahun 2016 Peningkatan Efisiensi Dan
Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang Di Pengadilan

SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi
Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik

Surat Panitera Mahkamah Agung RI nomor 2167/PAN/KU.00/8/2017 tanggal 23
Agustus 2017 tentang Pembayaran Biaya Kasasi/PK/HUM melalui
rekening virtual (*virtual account*)

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.09-HT.05.10
TAHUN 1998 Tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa Bagi Kurator Dan
Pengurus

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-HT.05.10 Tahun 2005 tentang
Pendaftaran Kurator Dan Pengurus

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2011
Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum
Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan
Terbatas

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2013.tentang Peraturan
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang
Pedoman Imbalan Bagi Kurator Dan Pengurus

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2013 tentang pendelegasian penandatanganan sertifikat jaminan Fidusia secara elektronik,

Peraturan Menteri Hukum dan HAM 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik,

Peraturan Menteri Hukum dan HAM 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Imbalan Bagi Kurator Dan Pengurus

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Serta Penyampaian Laporan Kurator Dan Pengurus

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK/02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 PMK/06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

Peraturan Dirjen Pajak No. PER-20/PJ/2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak Dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Secara Elektronik Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum Dan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IX.E.1. Transaksi Afiliasi Dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu

Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IX.E.2 Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama

Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor X.K.2 Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala

Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum AHU No. AHU.UM.01.01-580 Maret 2019 tentang Kewajiban Bagi Notaris untuk Melakukan Pemesanan Nama Perseroan Terbatas dan Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas dalam Satu Prosedur

Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum No AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Operasionalisasi Sistem Pendaftaran Fidusia Elektronik (online)

Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor
: AHU.1.KU.02.02-119 Tentang Pelaksanaan Sistem Informasi
Pembayaran Administrasi Hukum Umum (SIMPADHU) Pada Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum tanggal 11 Juni 2015.

Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2016 Tata Cara Pendaftaran,
Penagihan, Pembayaran, Dan Pelaporan Iuran Secara Online Bagi Peserta
Pekerja Penerima Upah dari Badan usaha baru dalam rangka kemudahan
berusaha

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor POJK.04/2014 tentang Direksi Dan
Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan
Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK/04/2014 tentang Penambahan
Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor POJK 31/POJK.04/2015 tentang
Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau
Perusahaan Publik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor POJK 32/POJK.04/2015 Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 POJK/04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan POJK 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 /POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

Surat Edaran OJK Nomor 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk Dan Isi Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik.

Peraturan Perundang-undangan Negara Lain

Netherlands Civil Code, <http://www.dutchcivillaw.com/civilcodegeneral.htm>)

Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) (KUH Perdata Jerman)

French Code Civil (KUH Perdata Prancis)

Gerechtsdeurwaarderswet 2001 (Bailiff/Judicial Officer Act 2001)

Netherlands Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders BTAG
2001.

Basic Law on Administrative Regulations (Rep. Korea), April 18, 1998

Laporan Penelitian/ Presentasi

Ali. M Hatta. 2016. *Keynote Speech Ketua Mahkamah Agung RI , Seminar Peran Peradilan dalam Meningkatkan Kemudahan Berusaha di Indonesia*, 7 Maret 2016.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2018. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*,

_____, 2018. *Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan atas UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*.

Choi, Daeyong Office of the Prime Minister Korea, *A Radical Approach to Regulatory Reform in Korea*, Paper dipaparkan pada The Annual 2001 Conference of the American Society for Public Administration at Rutgers University, New Jersey, USA. <https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/1898279.doc>

Commercial Finance Association. 2005. *Annual Asset-Based Lending and Factoring Surveys*,

Kementerian Negara PPN/Bappenas. 2015. *Strategi Nasional Reformasi Regulasi, Mewujudkan Regulasi yang Sederhana dan Tertib*.

Kementerian Negara PPN/Bappenas. 2019. Visi Indonesia 2045, diunduh pada <https://www.bappenas.go.id/id/profil-bappenas/unit-kerja/deputi-bidang-ekonomi/contents-deputi-bidang-ekonomi/visi-indonesia-2045/>

Indonesia, Letter of Intent, Memorandum Of Economic And Financial Policies to Internasional Monetary Funds, 31 Oktober 1997, <https://www.imf.org/external/np/loi/103197.htm>

Komite Peningkatan Daya Saing Nasional. 2020. *Laporan Tahunan 2019, Perbaikan Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business) di Indonesia*, Jakarta,

Mahkamah Agung, 2010. *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, Mahkamah Agung, Jakarta.

_____, Kelompok kerja Mahkamah Agung Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, 2015. *Naskah Akademik Peraturan Mahkamah Agung RI tentang Prosedur Gugatan Sederhana*, Jakarta, 2015.

_____, 2007. *Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2006*, Mahkamah Agung, Jakarta.

_____, 2020. *Panduan Pengisian Survei Kemudahan Berusaha 2020 Penegakan Kontrak (Enforcing Contract) Februari-Maret 2020*, Kelompok Kerja Kemudahan Berusaha, Mahkamah Agung RI

_____, 2020. *Panduan Pengisian Survei Kemudahan Berusaha 2020 Penyelesaian Kepailitan (Resolving Insolvency) Februari-Maret 2020*, Kelompok Kerja Kemudahan Berusaha, Mahkamah Agung RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI. 2020. *Memperkenalkan New Direktori Putusan*, Presentasi pada peluncuran Direktori Putusan Versi 3 pada 19 Agustus 2020.

Klaus Schwab, World Economic Forum (ed), *The Global Competitiveness Report 2019*, Geneva, Switzerland.

KPPOD, 2019. *Laporan Final, Evaluasi Setahun OSS Studi Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 2018 di Daerah*, KPPOD Jakarta.

Legal Execution Department, 2019. *Country Report, Country Report for the Meeting of Executives of Civil Judgment Enforcement Agencies of ASEAN Member Countries*, the People's Republic of China, the Republic of Korea, and the Russian Federation 26th April 2019, Bangkok, Thailand

Lembaga Kajian untuk Independensi Peradilan. 2018. *Asesmen Awal Permasalahan Eksekusi Putusan Perkara Perdata di Indonesia*, Jakarta.

Muco, Sagita, World Bank Group, Webinar IAI-AMCI April 2021, *Ease Of Doing Business In ASEAN*.

Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia & Lembaga Kajian untuk Independensi Peradilan, *Monitoring dan Evaluasi Gugatan Sederhana*, 2017

Shanghai High Court, 2019. *Brief Introduction to Shanghai Judiciary*, dipaparkan pada World Execution Conference, 2019, Shanghai.

Syamsul Maarif, Hakim Agung, *Presentasi Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Kelompok Kerja Kemudahan Berusaha Mahkamah Agung RI*, 2019.

Syarifuddin, *Sambutan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Webinar “Meningkatkan Peringkat Kemudahan Berusaha- Perspektif Pengadilan” Online*, 23 April 2021

USAID-Indonesia, *Changes for Justice, Final Report 2010-2015*.

UNCITRAL *Legislative Guide on Secured Transaction, Terminology and Recommendation*, 2009

Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP, *Investigation of Data Irregularities in Doing Business 2018 and Doing Business 2020, Investigation Findings and Report to the Board of Executive Director*, 15 September 2021.

World Bank Group. 2013. *Doing Business 2014, Understanding Regulations for Small and Medium Enterprise*, Washington DC, World Bank, 2013

_____, 2014. *Doing Business 2016, Going Beyond Efficiency*, Washington DC, World Bank.

- _____, 2015. *Doing Business 2016, Measuring Regulatory Quality and Efficiency*, Washington DC, World Bank.
- _____, 2016. *Doing Business 2017, Equal Opportunity for All*, Washington DC, World Bank.
- _____, 2017. *Doing Business 2018, Reforming to Create Jobs*, Washington DC, World Bank.
- _____, 2018. *Doing Business 2019, Training for Reform*, Washington DC, World Bank.
- _____, 2019. *Doing Business 2020, Comparing Business Regulation in 190 Economies.*, Washington DC, World Bank, 2019
- _____, *Kuesioner Survei Ease of Doing Business, Starting a Business*, 2020
- _____, *Kuesioner Survei Ease of Doing Business, Protecting Minority Investors*, 2020.
- _____, *Kuesioner Survei Ease of Doing Business, Getting Credits* 2020.
- _____, *Kuesioner Survei Ease of Doing Business, Enforcing Contract*, 2020.
- _____, *Kuesioner Survei Ease of Doing Business, Resolving Insolvency*, 2020.
- _____, International Bank For Reconstruction And Development, *Program Document For A Proposed Loan In The Amount Of US\$ 300 Million To The Republic Of Indonesia For The Indonesia First Financial Sector Reform Development Policy Financing*, 24 Februari 2020, The World Bank Group, Hal 29.

_____, *Secured Transactions Systems and Collateral Registries*, 2010.

World Bank Knowledge and Research- The Malaysia Development Experience Series, 2020. “*Public-Private Dialogue in Business Regulation Reform – A Case Study on PEMUDAH,*”

_____, Surat Doing Business Team kepada Deputy V Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tanggal 30 Agustus 2019 tentang *Doing Business 2020-Indonesia*.

_____, Surat Doing Business Team kepada PLT Deputy Pengembangan Iklim Investasi BKPM tanggal 17 Desember 2020 tentang *Doing Business 2021-Indonesia*

World Justice Project, *Rule of Law Index 2021*, Washington DC., USA., World Justice Project.

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), 2016. *Laporan Penelitian “Penyederhanaan Perizinan Usaha di Daerah,* 2016

Artikel / Tulisan

Bix, Brian . 2012. *Radbruch's Formula and Conceptual Analysis, Law, Liberty and the Rule of Law,*2012 ed. Imer B. Flores & Kenneth E. Himma, Dordrecht: Springer.

Calabresi, Guido. 1961. *Some Thoughts on Risk Distribution and the Law of Torts,* The Yale Law Journal Company, Inc. 70 (4): 499

- Coase, Ronald H. 1960, . *The Problem of Social Cost*, Journal of Law & Economics, vol 3
- Davis, Kevin E., Angelina Fisher, Benedict Kingsbury, and Sally Engle Merry, eds. 2012. *Governance by Indicators: Global Power Through Classification and Rankings*. Oxford University Press.
- Davis, Kevin E., Benedict Kingsbury, and Sally Engle Merry. 2012. Indicators as a Technology of Global Governance. *Law and Society Review* 46 (1):71–104.
- Davis, Kevin E., Sally Engle Merry, and Benedict Kingsbury. 2015. *The Quiet Power of Indicators: Measuring Governance, Corruption, and the Rule of Law*. Cambridge University Press.
- Doshi R, Judith G Kelley & Beth A Simmons, *The Power of Ranking: The Ease of Doing Business Indicator and Global Regulatory Behavior*, *International Organization* , Volume 73 , Issue 3 , Summer 2019 , pp. 611 - 643,
- Juwana, Hikmahanto. 2005. *Reform Of Economic Laws And Its Effects On The Post-Crisis Indonesian Economy*, *The Developing Economies*, XLIII-1 (March 2005): 72–90
- Muklis, Faiza, 2016. *Perkembangan Dan Tantangan Pasar Modal Indonesia*. Al Masraf (Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan)-Volume 1, No.1, Januari-Juni 2016, hal 69, diunduh dari <https://core.ac.uk/download/pdf/229197755.pdf>

McCormack, Gerard. 2018. *Why 'Doing Business' with the World Bank May Be Bad for You*, European Business Organization Law Review 19:649–676
<https://doi.org/10.1007/s40804-018-0116> .

M Nur Sholikin, 2019. *Monev Regulasi Antisipasi Tren Deregulasi Saat Kritis*
<http://www.pshk.or.id/id/blog-id/monev-regulasi-antisipasi-tren-deregulasi-saat-kritis/>

Posner, Richard A. 1975. *The Economic Approach to Law*, 1975, 53 Texas Law Review 757

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum & Peradilan MARI, 2004, *Naskah Akademis, Pembatasan Kasasi*, Jakarta,

J.H.M. van Erp* and L.P.W. van Vliet dalam *Real and Personal Security*, diunduh pada Electronic Journal of Comparative Law, <http://www.ejcl.org/64/art64-7.txt>

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Evaluasi Prolegnas 2015-2019, Diskusi Demokrasi Inklusif, 8 Agustus 2019.

_____, Siaran Pers PSHK. 2019. *Setengah Hati di Reformasi Regulasi, Lemah di Penegakan Hukum* <https://pshk.or.id/publikasi/siaran-pers/setengah-hati-di-reformasi-regulasi-lemah-di-penegakan-hukum/>

Stephan Haggard, *The Rule of Law and Economic Growth: Where are We ?*, pg 4, *Presentation at The University of Texas School Of Law, Conference on Measuring The Rule of Law, March 25-26, 2010.*

Kelley, Judith G & Beth A Simmons, *Introduction: The Power of Global Performance Indicators*, Published online by Cambridge University Press:
19 July 2019

Mansyur Ridwan, 2014. *Implementasi SIPP/CTS Dan SIADPA Berbasis IT "Menyambut Matahari Terbit Di Januari 2014"* <http://www.pn-tubei.go.id/artikel/implementasi-sippcts-dan-siadpa-berbasis-it-menyambut-matahari-terbit-di-januari-2014>, diakses 20 Mei 2021.

Muhammad Firman, 2019. *Sri Mulyani: Perlu Kepastian Hukum Untuk Tingkatkan Ekonomi*, diakses dari <https://katadata.co.id/berita/2017/05/11/sri-mulyani-indonesia-perlu-tingkatkan-kepastian-hukum> pada tanggal 1 Oktober 2019, pukul 11.37.

Kornhauser, Lewis, 2017. *The Economic Analysis of Law*", *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Fall 2017 Edition), Edward N. Zalta (ed.),
URL = <<https://plato.stanford.edu/archives/fall2017/entries/legal-econanalysis/>>.

Library of Economic and Liberty, *Ronald Coase (1910-2013)*,
<https://www.econlib.org/library/Enc/bios/Coase.html#:~:text=Ronald%20Coase%20received%20the,highly%20unusual%20Nobel%20Prize%20winner.>

Tyagi, Kalpana. 2013. *Introduction to Law & Economics*,
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2330251 terakhir
diakses 13 Juni 2021.

World Bank Group, 2020. *Global Economic Risk and Its Implication to Indonesia, Presentation to President of the Republic of Indonesia*, September 2020.

Sumber Internet

Peter Bondarenko, *Welfare State* <https://www.britannica.com/topic/welfare-state> diakses pada 22 April 2020

The Company House UK, *Get information about a company*, <https://www.gov.uk/get-information-about-a-company>, diakses pada 22 April 2020

Canuto, Otaviano, Center for Macroeconomics and Development, 28 Maret 2018, *The World Bank As Hummingbird: Leveraging Knowledge For Development Finance* <https://www.cmacrodev.com/the-world-bank-as-hummingbird-leveraging-knowledge-for-development-finance/> diakses terakhir 17 September 2021

Dutch Centraal Bureau voor de Statistiek, 2018. *Main Page*, <https://www.cbs.nl/en-gb>, terakhir diakses 20 Juni 2020

Euromoney, *About us*, <https://www.euromoneycountryrisk.com/methodology#AboutUs> terakhir diakses 12 September 2021

Federal Court Australia, *Description of National Practice Areas*, <https://www.fedcourt.gov.au/about/national-court-framework/npas/all-npas>, terakhir diakses 20 Juni 2020

Pasukan Petugas Khas Pemudah Perniagaan (Pemudah), *Halaman Utama*,
<http://www.mpc.gov.my/pemudah/>. terakhir diakses 20 Juni 2020

Victoria State Government, *Sheriffs in Victoria Australia*,
<https://www.justice.vic.gov.au/justice-system/sheriffs-in-victoria>, terakhir
diakses 20 Juni 2020

The History of Utilitarianism, Stanford Encyclopedia of Philosophy,
<https://plato.stanford.edu/entries/utilitarianism-history/#JerBen>, terakhir
diakses 13 Juni 2021

NSW Courts Tribunals and Service Delivery, *Office of the Sheriff of New South
Wales*,
[http://www.courts.justice.nsw.gov.au/Pages/cats/catscorporate
scorporate_officeofsheriff/catscorporate_officeofsheriff.aspx](http://www.courts.justice.nsw.gov.au/Pages/cats/catscorporate_aboutus/catscorporate_officeofsheriff/catscorporate_officeofsheriff.aspx). terakhir
diakses 20 Juni 2020

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, *Kredit Usaha Rakyat*,
<https://kur.ekon.go.id>. terakhir diakses 20 Juni 2020

Kompas. *Naskah Lengkap Pidato Presiden Joko Widodo dalam Pelantikan Periode
2019-2024* [https://nasional.kompas.com/jeo/naskah-lengkap-pidato-
presiden-joko-widodo-dalam-pelantikan-periode-2019-2024](https://nasional.kompas.com/jeo/naskah-lengkap-pidato-presiden-joko-widodo-dalam-pelantikan-periode-2019-2024)

Korea. Regulatory Reform Committee, About RRC,
<https://www.better.go.kr/fzeng.page>AboutRRC.laf> terakhir diakses 29
Agustus 2021.

Malaysia Department of Insolvency, *Official Portal Malaysia Department of Insolvency* <http://www.mdi.gov.my/> terakhir diakses 20 Juni 2020

Michigan Legal Publishing Limited, *US Bankruptcy Codes*, <https://www.usbankruptcycode.org/>, terakhir diakses 20 Juni 2020

Otoritas Jasa Keuangan, *Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)* <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10422>, terakhir diakses 20 Juni 2020

World Bank Group, Open Knowledge Repository, *Corporate Flagships*, <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/2123>, diakses pada 22 April 2020

World Bank Group, *Doing Business*, <http://www.doingbusiness.org>

World Bank Group, *Ease of Doing Business rankings*, <https://www.doingbusiness.org/en/rankings>, terakhir diakses 20 Juni 2020

World Bank “*Business Reforms in Indonesia*” <https://www.doingbusiness.org/en/reforms/overview/economy/indonesia>, terakhir diakses 20 Juni 2020

World Bank Group, *Ease of Doing Business in Indonesia*, <https://www.doingbusiness.org/en/data/exploreconomies/indonesia>, terakhir diakses 20 Juni 2020

World Bank Group, *Indonesia Getting Credit Strength of Legal Rights Index* bisa dilihat pada

<http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/indonesia#getting-credit>, terakhir diakses 20 Juni 2020

World Bank Group, *Frequently Asked Questions, Protecting Minority Investors*,
<https://www.doingbusiness.org/en/data/exploretopics/protecting-minority-investors/faq>, terakhir diakses 20 Juni 2020

World Bank Group, *Protecting Minority Investors-Methodology*
<https://www.doingbusiness.org/en/methodology/protecting-minority-investors>, terakhir diakses 20 Juni 2020

World Bank Group, *Enforcing Contract-Methodology*
<https://www.doingbusiness.org/en/methodology/enforcing-contracts>,
terakhir diakses 20 Juni 2020

World Bank Group, *Resolving Insolvency -Methodology*
<https://www.doingbusiness.org/en/methodology/resolving-insolvency>,
terakhir diakses 20 Juni 2020

World Bank Group, *Doing Business Calculator*,
https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/excel/db2020/DB20_s_core_calculator.xlsx, terakhir diakses 20 Juni 2020

Thailand Legal Execution Department, *History of Legal Execution Department*
<http://www.led.go.th/history/legalt.asp>, terakhir diakses 20 Juni 2020

World Economic Forum, *Global Competitiveness Report 2014*,
<http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/rankings/>, terakhir diakses 20 Juni 2020

Accounting and Corporate Regulatory Authority, *Setting Up Local Companies-Shares and Shareholders*, <https://www.acra.gov.sg/how-to-guides/setting-up-a-local-company/shares-and-shareholders>, terakhir diakses 20 Juni 2020

Investopedia, *Floating Charge*,
https://www.investopedia.com/terms/f/floating_charge.asp, terakhir
diakses 20 Juni 2020

Pemudah Background, <http://www.mpc.gov.my/pemudah/background/> Diakses
terakhir 2 Juni 2021.

Berita

Angsku, Tarin.2020. Thailand National News Bureau & Public Relation, *Thailand is in the process of "Ease of Doing Business" reforms*
<https://thainews.prd.go.th/en/news/detail/TCATG201130145450754>
tanggal 20 November 2020 terakhir diakses tanggal 20 Juni 2021.

Ardin, Sutan Eris, 2012. Bisnis.com, *Wajib Fidusia APPI Lakukan Uji Materi Peraturan Menteri Keuangan*.
<https://kabar24.bisnis.com/read/20120919/186/96508/wajib-fidusia-appi-lakukan-uji-materi-peraturan-menkeu>, tanggal 19 September 2012, terakhir
diakses tanggal 26 Juni 2021.

Afriyadi Dwi. *Nasib BUMN Kertas Leces Sudah Bangkrut Aset Bermasalah*, di
akses <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4699825/nasib-bumn-kertas-leces-sudah-bangkrut-aset-bermasalah/1>. pada tanggal 2
Oktober pukul 14.40.

Bata, Anselmus. 2020. Berita Satu., *Ini Isi dan Penjelasan UU Cipta Kerja*, <https://www.beritasatu.com/ekonomi/684511/ini-isi-dan-penjelasan-uu-cipta-kerja>, tanggal 6 Oktober 2020, terakhir diakses tanggal 20 Juni 2021.

Deny, Septian.2015.Bisnis Online, *Pangkas Regulasi: Pemerintah akan Bentuk Komite* <http://bisnis.liputan6.com/read/2311877/pangkas-regulasi-pemerintah-bakal-bentuk-komite> , 7 September 2015, diakses pada 25 Juni 2021

Tobing, Mona. 2019. Kontan Online, *Fidusia tak dibayar, kerugian Negara Rp. 300 M*, diakses pada tanggal 2 Oktober 2019 melalui <http://keuangan.kontan.co.id/news/fidusia-tak-dibayar-kerugian-negara-rp-300-m> Pukul 14.05.

Laoli, Noverius, 2013. Kontan Online. *Paket Kebijakan Ekonomi 2013: 17 langkah Kemudahan Berusaha* <https://nasional.kontan.co.id/news/ini-detail-8-paket-kebijakan-untuk-dunia-usaha>

Humas Sekretariat Kabinet RI, 2016. Kemendagri Resmi Umumkan 3.143 Perda Yang Dibatalkan , <https://setkab.go.id/kemendagri-resmi-umumkan-3-143-perda-yang-dibatalkan/> terakhir diakses 30 Mei 2021

Humas Kemenko Perekonomian, Siaran Pers. 2019. *Penyederhanaan Regulasi dan Monitoring Dunia Usaha Jadi Andalan Pemerintah Percepat Pertumbuhan Ekonomi*, <https://ekon.go.id/publikasi/detail/883/penyederhanaan-regulasi-dan-monitoring-dunia-usaha-jadi-andalan-pemerintah-percepat-pertumbuhan-ekonomi>

Moore, Simon, 2015. Contractor UK, *Conservative manifesto – what's in it for contractors*,

https://www.contractoruk.com/news/0012003conservative_manifesto_key_pledges_contractors.html, 16th April, 2015 terakhir diakses 20 Juni 2021

Erwanti, Marlinda Oktavia. 2020.detikNews, *Jokowi: RI Obesitas Regulasi, Bikin Kita Terjerat Aturan Sendiri*, <https://news.detik.com/berita/d-4876025/jokowi-ri-obesitas-regulasi-bikin-kita-terjerat-aturan-sendiri> tanggal 28 Januari 2020. Terakhir diakses 20 Juni 2020.

Detikfinance, *Ketika 2 Bursa Saham Bergabung Jadi BEI di 2007*, <https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-2718957/ketika-2-bursa-saham-bergabung-jadi-bei-di-2007> , tanggal 15 Oktober 2014, terakhir diakses 17 Juni 2021.

Putra, Nanda Narendra, Hukumonline.com. 2016. *Implementasi Perma Gugatan Sederhana Terbentur Masalah Domisili*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt576961058a940/implementasi-perma-gugatan-sederhana-terbentur-masalah-domisili>, tanggal 21 Juni 2016, terakhir diakses 17 Juni 2021.

Elnizar , Norman Edwin, 2018. Hukumonline.com *Notaris Perlu Tahu! Bayar PNPB Kini Wajib dengan Aplikasi YAP*, <https://jurnal.hukumonline.com/berita/baca/lt5a4c0706a8232/notaris-perlu-tahu-bayar-pnpb-kini-wajib-dengan-aplikasi-yap?page=all>. tanggal 3 Januari 2018, terakhir diakses 17 Juni 2021.

- _____, 2019. *Sistem Pembayaran Online di Aplikasi YAP Dicaci Maki Oknum Notaris, Ini Kata Dirjen AHU.*
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a6c3cd551d6b/sistem-pembayaran-online-di-aplikasi-yap-dicaci-maki-oknum-notaris--ini-kata-dirjen-ahu?page=all>, tanggal 27 Januari 2018, terakhir diakses 2 Juni 2021.
- Faraytody, Leo, 2020. *Hukumonline.com Reformasi Perizinan Berusaha di Indonesia: Sebuah Catatan*
<https://hukumonline.com/berita/baca/lt5f10091077b6d/reformasi-perizinan-berusaha-di-indonesia--sebuah-catatan-oleh--leo-faraytody?page=all> , tanggal 16 Juli 2020, diakses terakhir 30 Mei 2021.
- Nursobah, Asep, 2020. *Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, Luncurkan Dirput Versi 3, Mahamah Agung luncurkan Dirput versi 3, Mahkamah Agung gelar Dialog interaktif dengan tema modernisasi pengadilan untuk Indonesia maju* <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/kegiatan/1692-luncurkan-dirput-versi-3-ma-gelar-dialog-interaktif-dengan-tema-modernisasi-pengadilan-untuk-indonesia-maju>, tanggal 24 Agustus 2020, diakses terakhir 30 Mei 2021.
- DPR, RI, *Paripurna DPR Sepakati 33 RUU Prolegnas Prioritas 2021*
<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/32239/t/Paripurna+DPR+Sepakati+33+RUU+Prolegnas+Prioritas+2021>, tanggal 23 Maret 2021, diakses terakhir 20 Juni 2021

Thea, Ady DA, 2019. Hukumonline.com, *MA Diminta Batalkan PP OSS*,
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5d70e7e3c4062/ma-diminta-batalkan-pp-oss/> , tanggal 3 September 2019 terakhir diakses tanggal 20 Juni 2021.

Olivia, Gracia. 2019. Kontan Online. *Revisi 72 UU menjadi omnibus law, Darmin: Semuanya terkait perizinan*, <https://nasional.kontan.co.id/news/revisi-72-uu-menjadi-omnibus-law-darmin-semuanya-terkait-perizinan>, tanggal 13 September 2019 terakhir diakses tanggal 20 Juni 2021.

Noor, Muhammad. 2018. Mahkamah Agung. *Mahkamah Agung Menandatangani Nota Kesepahaman dan Addendum Nota Kesepahaman dengan Mitra Kerja Perbankan*, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3167/mahkamah-agung-menandatangani-nota-kesepahaman-dan-addendum-nota-kesepahaman-dengan-mitra-kerja-perbankan>, tanggal 28 Agustus 2018 terakhir diakses tanggal 20 Juni 2021.

Rahayu, Ismiati D. 2020, Media Notaris, *Harga Diri Notaris : 1 Akta, Sepiring Nasi Rendang...!*
<http://medianotaris.com/harga-diri-notaris-akta-sepiring-nasi-rendang-berita191.html> , tanggal 22 Oktober 2012, terakhir diakses tanggal 20 Juni 2021.

Wahyudi, Reza (ed). 2013. Kompas.com,
<https://tekno.kompas.com/read/2013/02/19/12473397/kurator.siap.berunding.denga>, tanggal 19 Februari 2013, diakses terakhir 30 Mei 2021.

Putusan Pengadilan

Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor 69 P/HUM/2019, Yayasan Wahana Lingkungan Hidup, Perkumpulan Pemantau Sawit, Perkumpulan Kaoem Telapak, Harianto, Jalalludin, Abdul Rasis melawan Presiden Republik Indonesia

Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor 30 PK/Pdt.Sus.Pailit/2013 PT Prima Jaya Informatika vs PT Telekomunikasi Seluler,

Mahkamah Agung RI, Putusan No. 372 K/Sip/1970 BNI cabang Semarang vs. Lo Ding Siang.

Mahkamah Agung RI, Putusan No. 1500K/ Sip/1978 BNI 1946 vs. Fa Megaria

Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 67/PUU-XI/2013, Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 pengujian terhadap Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Putusan Nomor 48/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST PT Prima Jaya Informatika vs PT Telekomunikasi Seluler.

Wawancara dan Diskusi yang Informasinya Digunakan dalam Penelitian ini.

Wawancara dengan Customer Service LPIP PT Pefindo Biro Kredit, April 2020

Wawancara dengan Customer Service LPIP PT Kredit Biro Informasi Jaya (KBIJ),
April 2020.

Diskusi dengan Sekretaris Tim Penyusun Naskah Akademik Perubahan RUU
Kepailitan dan PKPU Badan Pembinaan Hukum Nasional, pada tahun
2017.

Diskusi dengan Office for Public Sector Development Commission Thailand, Dr
Nicha Sathornkich (director) dan Natta Bhachaiyud (Commissioner
OPDC), 18 Oktober 2019

Interview dengan mantan Tenaga Ahli Senior Kebijakan Publik KPDSN, 2016-
2019, pada 15 Juni 2021.

Diskusi dengan Wilhelm van de Donk, President, Association of Judicial Officers
Netherlands dan DWJ van Leuwen (Special Advisor
international) Association of Judicial Officers Netherlands, Den Haag , 26
April 2019.

Diskusi dengan Brendon Facey, Director and Sheriff, Victorian Department of
Justice, Department Of Justice Victoria, 28 November 2016